

---

## PENGEMBANGAN WAWASAN SENSITIVITAS KONFLIK BAGI PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT

Edwin M.B. Tambunan<sup>1</sup>, Aleksius Jemadu<sup>2</sup>, Elyzabeth B. Nasution<sup>3</sup>, Firman Daud Lenjau Lung<sup>4</sup>  
<sup>1, 2, 3, 4</sup>Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Pelita Harapan (UPH)

[edwin.tambunan@uph.edu](mailto:edwin.tambunan@uph.edu), [aleksius.jemadu@uph.edu](mailto:aleksius.jemadu@uph.edu), [elyzabeth.nasution@uph.edu](mailto:elyzabeth.nasution@uph.edu),  
[firman.lung@uph.edu](mailto:firman.lung@uph.edu)

---

### Abstrak

Salah satu tanggung jawab dari penyelenggara negara, khususnya di lingkungan eksekutif dan legislatif, adalah merumuskan kebijakan publik. Bagi pemerintah, kebijakan publik merupakan instrumen dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, sedangkan bagi masyarakat, kebijakan publik adalah jaminan untuk mengakses hak politik, ekonomi, sosial, dan hukum sebagai warga negara. Salah satu indikator kebijakan publik yang baik adalah apabila kebijakan tersebut dapat diimplementasikan tanpa penolakan dari masyarakat, baik berupa perdebatan, demonstrasi, bahkan konflik. Peluang penolakan sebuah kebijakan publik semakin tinggi di daerah dengan keragaman suku, agama, dan ras yang berlapis dengan perbedaan status sosial ekonomi. Risiko konflik semakin besar jika daerah tersebut menjadi daerah terbuka bagi pendatang sehubungan dengan pengembangan industri pariwisata, seperti Labuan Bajo, di Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Untuk itulah Lokakarya Pengembangan Wawasan Sensitivitas Konflik dilaksanakan dengan menargetkan penyelenggara Kabupaten Manggarai Barat. Kegiatan berlangsung pada Jumat, 1 Maret 2024, bertempat di Kantor Bupati Manggarai Barat, dan dihadiri Wakil Bupati Manggarai Barat beserta perwakilan Perangkat Daerah. Pada lokakarya, peserta mendapat pemahaman mengenai potensi konflik di Kabupaten Manggarai Barat, wawasan konflik dan perdamaian, serta wawasan sensitivitas konflik. Hasil lokakarya kemudian diukur pada sesi praktik di mana para peserta berhasil mengaplikasikan pemahamannya pada tiga studi kasus yang disediakan berkisar perumusan kebijakan publik.

**Kata Kunci:** kebijakan publik, Manggarai Barat, sensitivitas konflik

---

### PENDAHULUAN

Salah satu tanggungjawab dari para penyelenggara negara, khususnya di lingkungan eksekutif dan legislatif, adalah merumuskan kebijakan publik. Keberadaan rumusan kebijakan publik, yang dapat hadir dalam wujud peraturan, keputusan, instruksi, pedoman, dan standar, dirasakan penting baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Bagi para penyelenggara negara, kehadiran rumusan kebijakan publik ini sangat penting karena akan menjadi instrumen dalam

melaksanakan tugas pokok dan fungsi mereka untuk memastikan terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dan terpeliharanya ketertiban umum. Sementara bagi masyarakat, perumusan kebijakan publik itu diharapkan menjamin mereka untuk mengakses hak-hak politik, ekonomi, sosial, dan hukum sebagai warga negara.

Baik buruknya suatu rumusan kebijakan publik akan terlihat saat diimplementasikan. Apabila produk kebijakan publik itu benar-benar membantu para penyelenggara dalam melaksanakan

tugas pokok dan fungsi mereka secara efektif dan efisien dan sama sekali tidak mendapatkan penolakan dari masyarakat, berarti rumusnya sudah baik dan dianggap telah mengakomodasi kepentingan semua pihak.

Namun, dalam kenyataannya situasi ideal sebagaimana digambarkan di atas terkadang tidak terjadi. Adakalanya, di saat proses perumusannya saja produk kebijakan publik tersebut telah menimbulkan perdebatan bahkan pertentangan antara penyelenggara negara dan masyarakat, maupun perpecahan di tengah masyarakat. Saat pengimplementasiannya, produk kebijakan publik itu menghadapi gelombang penolakan yang tidak jarang berujung dengan demonstrasi menggunakan kekerasan yang merusak ketertiban umum.

Peluang penolakan terhadap produk kebijakan publik semakin tinggi apabila suatu wilayah memiliki keragaman dari segi suku, agama, dan ras. Peluangnya lebih tinggi lagi apabila perbedaan suku, agama, dan ras berlapis dengan perbedaan status sosial ekonomi. Penolakan biasanya terjadi karena kelompok dan golongan tertentu merasa mendapat perlakuan diskriminatif atau akses terhadap pemenuhan hak-haknya menjadi terhalang.

Sepanjang tahun 2021–2023, komposisi agama di Kabupaten Manggarai Barat konsisten, dengan urutan sebagai berikut: 1) Kristen Katolik (78,06%; 77,99%; 78,02%), 2) Islam (21,16%, 21,15%, 21,16%), 3) Kristen Protestan (0,72%, 0,8%, 0,74%), 4) Hindu (0,06%, 0,06%, 0,08%), dan 5) Budha (0%, 0,01%, 0,01%) (BPS Kabupaten Manggarai Barat, 2024). Jika pemerintah tidak berhati-hati, kebijakan publik yang tidak memerhatikan komposisi agama ini akan berujung pada penolakan.

Risiko suatu produk kebijakan publik menimbulkan konflik semakin lebih tinggi lagi apabila wilayah tersebut menjadi daerah terbuka bagi pendatang sehubungan dengan pengembangan industri pariwisata seperti Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat. Pada tahun 2023, dari 12 kecamatan di Kabupaten Manggarai Barat, Kecamatan Komodo, di mana Labuan Bajo berada,

memiliki jumlah penduduk terbesar, yaitu 58.912 jiwa (BPS Kabupaten Manggarai Barat, 2024).

Pangkal masalah dari adanya penolakan terhadap suatu produk kebijakan publik bukanlah karena perbedaan-perbedaan yang ada, tetapi karena kegagalan mengelola perbedaan tersebut. Salah satu penyebabnya adalah ketidakmampuan para penyelenggara negara untuk mengamati dengan cermat polarisasi kepentingan sehubungan dengan perbedaan-perbedaan tersebut dan ketidakmampuan mereka mengagregasi atau mengakomodasi ragam kepentingan yang timbul dari perbedaan tersebut ke dalam kebijakan publik yang berkeadilan.

Bercermin pada kenyataan di atas, para penyelenggara negara perlu memiliki sensitivitas konflik sesuai dengan karakteristik wilayahnya di dalam merumuskan bentuk kebijakan publik apa pun. Para ahli mendefinisikan sensitivitas konflik sebagai *kapasitas sebuah organisasi untuk 1) memahami konteks (konflik) di mana organisasi beroperasi; 2) memahami interaksi antara operasi organisasi dan konteks (konflik); dan 3) mengambil langkah/aksi sesuai dengan pemahaman interaksi tersebut guna menghindari dampak-dampak negatif dan memaksimalkan dampak-dampak positif dari konteks (konflik) yang ada* (Barbolet, Goldwyn, Groenewald, Sherriff, 2005). Dengan kata lain, pemerintah – dalam hal ini pemerintah daerah Kabupaten Manggarai Barat – perlu memahami konteks masyarakat secara menyeluruh, interaksi di dalam masyarakat, serta interaksi masyarakat dengan pemerintah, agar dapat mengambil keputusan dan membuat peraturan yang diterima serta dijalankan tanpa penolakan berarti.

Sensitivitas konflik pada hakikatnya adalah analisis potensi konflik dan dampak konflik dari suatu kebijakan, strategi, program, atau proyek yang dirumuskan, sehingga dapat diketahui secara dini peluang keberlanjutannya dan peluang stabilitas di dalam masyarakat yang menjadi targetnya. Untuk itu, para pembuat keputusan dan pembuat kebijakan perlu dilatih agar memperoleh pemahaman yang tepat mengenai karakteristik masyarakat serta aspek-aspek mengenai konflik. Pemahaman mengenai sensitivitas konflik harus diperoleh dari para pakar di bidang perdamaian dan

konflik (*peace and conflict studies*) sebagai payung bidang ilmu.

Untuk itulah, Program Studi Hubungan Internasional Universitas Pelita Harapan (Prodi HI UPH) bersama dengan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat melaksanakan kegiatan bertajuk “Lokakarya Pengembangan Wawasan Sensitivitas Konflik”. Tujuan pelaksanaan lokakarya ini antara lain untuk: 1) mengetahui potensi konflik di wilayah Kabupaten Manggarai Barat; 2) memahami prinsip-prinsip dasar konflik; 3) memiliki wawasan sensitivitas konflik; dan 4) mampu melakukan analisis konflik sederhana dan menyusun rekomendasi untuk perumusan kebijakan berbasis analisis. Target peserta yang diharapkan hadir pada lokakarya adalah aparatur penyelenggara negara di lingkungan eksekutif dan legislatif Kabupaten Manggarai Barat yang berperan dalam perumusan kebijakan publik.

## METODE

Lokakarya Pengembangan Wawasan Sensitivitas Konflik dilaksanakan dalam rangkaian kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) tim Youth & Peace Project Prodi HI UPH di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Pada 27–29 Februari 2024, tim Youth & Peace Project melaksanakan kegiatan “Pendidikan Keterampilan Perdamaian dan Resolusi Konflik untuk Siswa Sekolah Lentera Harapan (SLH) Labuan Bajo”. Setelahnya, tim melanjutkan PkM bersama Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat dalam bentuk lokakarya. Rangkaian kegiatan ini juga merupakan implementasi dari Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding / MoU*) antara Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat dengan Universitas Pelita Harapan tentang Kerja Sama di Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dengan nomor Pem. 131/03/MoU/I/2023 dan 036/R-UPH/I/2023.

Proses persiapan dimulai pada akhir bulan Januari 2024 dengan pengiriman surat resmi dari Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UPH kepada Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat. Pada surat, usulan kegiatan adalah pada 26 Februari

2024. Surat tersebut dibalas dengan usulan perubahan tanggal menjadi 1 Maret 2024, mengingat pada tanggal usulan, Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat sedang melaksanakan rangkaian kegiatan memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Kabupaten Manggarai Barat ke-21. Tanggal tersebut kemudian disanggupi oleh tim Prodi HI UPH dan pelaksanaan lokakarya pun disepakati.

Setelahnya, persiapan berlanjut dengan penyusunan materi lokakarya oleh para fasilitator. Dalam kerangka acuan yang diusulkan bersama surat, tim Prodi HI UPH mengajukan empat sesi dalam lokakarya, yaitu 1) Potensi Konflik di Kabupaten Manggarai Barat dan Labuan Bajo; 2) Memahami Konflik, 3) Wawasan Sensitivitas Konflik; dan 4) Penggunaan Analisis Konflik untuk Membantu Perumusan Kebijakan. Tiga sesi pertama berisi pemahaman konteks dan teoretis, sedangkan sesi terakhir berfokus pada pelatihan aplikasi pemahaman yang telah diperoleh sebelumnya melalui studi kasus.

Lokakarya dilaksanakan di kantor Bupati Manggarai Barat. Selain itu, dukungan nyata terlihat dari Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat yang juga memastikan kelengkapan dan kesiapan ruangan lokakarya (lokasi), serta konsumsi bagi para peserta dan fasilitator. Tim Prodi HI UPH bertanggung jawab dalam menyiapkan materi lokakarya, sebagai fasilitator, pembawa acara, serta logistik lainnya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Lokakarya Pengembangan Wawasan Sensitivitas Konflik dilaksanakan pada Jumat, 1 Maret 2024, bertempat di Ruang Rapat Kantor Bupati Manggarai Barat, pada pkl. 09.00–16.00 WITA. Sebanyak 34 orang hadir sebagai peserta, termasuk di antaranya adalah dr. Yulianus Weng, M.Kes., Wakil Bupati Manggarai Barat.



Gambar 1. Wakil Bupati Manggarai Barat, dr. Yulianus Weng, M.Kes. bersama Prof. Dr. Edwin M. B. Tambunan, S.I.P., M.Si. (kiri) dan Prof. Aleksius Jemadu, Ph.D. (kanan)

Selain Wakil Bupati, para peserta berasal dari antara lain: 1) Pangkalan TNI Angkatan Laut Labuan Bajo; 2) Pos Perwakilan TNI Angkatan Udara Labuan Bajo; 3) Komando Distrik Militer 1612 Manggarai; 4) Badan Intelijen Strategis Komando Distrik Militer 1612 Manggarai; 5) Kepala Satuan Samapta Kepolisian Resor Manggarai Barat; 6) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai Barat; 7) Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat; 8) Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Manggarai Barat; 9) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai Barat; 10) Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Manggarai Barat; 11) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Manggarai Barat; 12) Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Manggarai Barat; 13) Dinas Peternakan Kabupaten Manggarai Barat; 14) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Manggarai Barat; 15) Dinas Sumber Daya Alam, Bina Marga, dan Bina Konstruksi Kabupaten Manggarai Barat; 16) Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Manggarai

Barat; 17) Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat; 18) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Manggarai Barat; 19) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Barat; 20) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Manggarai Barat; 21) Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Manggarai Barat; 22) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Manggarai Barat; dan 23) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Manggarai Barat.



Gambar 2. Peserta Lokakarya

Sebagai acara kolaborasi antara Prodi HI UPH dan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, lokakarya dimulai dengan kata sambutan dari kedua belah pihak. Setelah rangkaian seremonial, lokakarya kemudian berlangsung dengan susunan sesi sebagai berikut:

**Tabel 1. Susunan Sesi pada Lokakarya**

Topik	Fasilitator
Mengantisipasi Potensi Konflik di Kota Labuan Bajo	Prof. Aleksius Jemadu, Ph.D.
Memahami Konflik	Elyzabeth B. Nasution, S.I.P., M.A.
Wawasan Sensitivitas Konflik	Prof. Dr. Edwin M.B. Tambunan, S.I.P., M.Si.
Praktik: Penggunaan Analisis Konflik untuk Membantu Perumusan Kebijakan	1. Prof. Dr. Edwin M.B. Tambunan, S.I.P., M.Si. 2. Elyzabeth B. Nasution, S.I.P., M.A. 3. Roy V. Pratikno, B.A., B.Sc., M.M. 4. Qanszelir GB Pandjaitan XIV, S.Sos.,

	M.Sos.
--	--------

### 1. Mengantisipasi Potensi Konflik di Kota Labuan Bajo

Sesi pertama dalam lokakarya dibawakan oleh Prof. Aleksius Jemadu, Ph.D. yang juga adalah putra daerah Manggarai. Dengan berfokus pada Labuan Bajo sebagai Destinasi Pariwisata Super Prioritas, sesi pertama ini bertujuan untuk: 1) Mengenali kemajemukan penduduk kota Labuan Bajo dan potensi konflik di dalamnya; 2) Mengenali fenomena transnasionalisme dalam kota pariwisata yang terekspos ke dunia internasional; dan 3) Melihat Multikulturalisme sebagai pendekatan dalam pelayanan publik untuk bina damai.

Secara garis besar, sesi pertama mengangkat beberapa isu kepada para peserta. Pertama, dengan menyadari keragamannya, masyarakat damai di Kabupaten Manggarai Barat, khususnya Labuan Bajo, tidak terjadi dengan sendirinya, tapi perlu dibangun untuk mencegah potensi konflik yang bersumber dari dalam maupun dari luar. Data statistik mengenai keragaman di Labuan Bajo menjadi pengingat urgensi poin pertama ini.

Kedua, keberadaan Labuan Bajo yang sudah *go international* membuat kota ini rentan terhadap fenomena transnasionalisme dalam bentuk sentimen keagamaan dan etnis. Transnasionalisme dipahami sebagai penyebaran pengaruh konflik lintas batas negara terkait isu-isu yang sensitif, termasuk konflik antarumat beragama, yang memiliki implikasi global atau transnasional (Brown, 1996). Berkaitan dengan penetapan Labuan Bajo sebagai Destinasi Pariwisata Super Prioritas, hal ini membawa maraknya industri pariwisata yang menyebabkan segregasi sosial-ekonomi di kalangan masyarakat. Untuk itu, pemerintah perlu memberdayakan masyarakat setempat, dengan mengundang kehadiran Tokoh Agama (Toga), Tokoh Adat (Toda), dan Tokoh Masyarakat (Tomas).

Terakhir, sesi ini mengangkat pentingnya pendidikan multikulturalisme yang menekankan pengenalan kognitif akan keragaman yang membawa pengayaan pengalaman kemanusiaan

secara sosial. Tidak lupa, pendidikan kewargaan yang demokratis (*democratic citizenship*) juga diimplementasikan dengan menciptakan arena kontestasi “loyalitas jamak” di kalangan generasi muda (Marcedo, 2000).

### 2. Memahami Konflik

Sesuai dengan judulnya, sesi kedua mengajak para peserta memahami konflik dengan memikirkan 1) Makna konflik; 2) Situasi konflik; 3) Hakikat konflik; 4) Penyebab konflik; dan 5) Tahapan konflik. Sesi ini memberi pemahaman awal terkait hal-hal mendasar mengenai konflik sebagai amunisi pada sesi berikutnya.

Konflik dimaknai sebagai hubungan antara dua pihak atau lebih (individu atau kelompok) yang memiliki, atau merasa memiliki sasaran-sasaran yang tidak sejalan (Barash & Webel, 2009). Setelah memahami ini, peserta diajak memikirkan situasi-situasi konflik. Situasi ini dapat dianalisis dengan memperhatikan aspek *perilaku* dan *sasaran*. Ketika perilaku dan sasaran selaras, tidak akan ada konflik. Jika perilaku selaras tapi sasaran berbeda, di situ ada *konflik laten*. Apabila perilaku bertentangan tapi sasaran sama, maka *konflik di permukaan* terjadi. Terakhir, ketika perilaku bertentangan dan sasaran berbeda, maka kita akan menghadapi *konflik terbuka* (de Koning & Handerson, 2010). Pemahaman ini penting bagi para aparatur negara untuk mengidentifikasi potensi konflik dan perkembangannya.

Pada sesi ini pula peserta mempelajari hakikat konflik yang pada dasarnya adalah kenyataan hidup, berguna, dan mendorong perubahan. Setelahnya, peserta kemudian mendapatkan pemahaman mengenai penyebab konflik. Setidaknya ada lima penyebab konflik: 1) penyebab struktural; 2) kepentingan; 3) perbedaan nilai; 4) perbedaan data; dan 5) hubungan antarmanusia (de Koning & Handerson, 2010).

Terakhir, pada sesi ini peserta mempelajari tahapan konflik. Dengan memahami tahapan konflik, peserta dapat mengetahui bentuk penyelesaian konflik yang efektif. Secara garis besar, tahapan konflik terdiri dari: 1) *shimmering tension*; 2) *emerging conflict*; 3) *escalation*; 4) *confrontation*; 5) *crisis*; 6) *de-escalation*; dan 7)

*settlement/resolution* (de Koning & Handerson, 2010).

### 3. Wawasan Sensitivitas Konflik

Sesi teori terakhir merupakan sesi yang melengkapi pemahaman peserta mengenai konteks Labuan Bajo, Manggarai Barat dan pemahaman mengenai konflik sehingga dapat mengambil keputusan yang tidak berujung pada penolakan. Sesi ini memiliki tujuan untuk: 1) Memahami makna dan hakikat sensitivitas konflik; 2) Mengetahui arti penting sensitivitas konflik; 3) Melihat kegunaan sensitivitas konflik; dan 4) Mengembangkan sensitivitas konflik.

Kehadiran sensitivitas konflik didasarkan pada pengalaman dari organisasi kemanusiaan, pembangunan dan bina damai di daerah-daerah konflik internasional. Organisasi tersebut mengucurkan bantuan kemanusiaan yang justru menambah konflik, bukan meredakannya. Bantuan pembangunan pun memperburuk ketegangan dan kegiatan bina damai gagal mewujudkan perdamaian. Ini kemudian memicu *international alert* (International Alert, 2004) di mana komunitas internasional akhirnya menyadari perlunya pengembangan sensitivitas konflik untuk memahami hubungan antara program-program yang diberikan/dijalankan dengan konflik. Setelahnya, sensitivitas konflik dinilai bermanfaat untuk diaplikasikan dalam kebijakan publik secara luas (Gaigals & Leonhardt, 2001).

Sensitivitas konflik dimaknai sebagai pendekatan untuk memastikan bahwa intervensi (program yang dijalankan/diberikan) yang dilakukan, jangan sampai secara tidak sengaja berkontribusi terhadap konflik; sebaliknya justru memperkuat inklusi, partisipasi, dan rasa kepemilikan. Cara memastikannya adalah dengan mengembangkan kapasitas organisasi untuk: 1) memahami konteks di mana organisasi beroperasi; 2) memahami interaksi antara intervensi yang sedang atau yang akan dilaksanakan dan konteksnya; dan 3) bertindak berdasarkan pemahaman ini, untuk menghindari dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif (Barbolet, Goldwyn, Groenewald, Sherriff, 2005). Untuk itu, sensitivitas konflik harus berbasis data dan analisis;

tidak mengesampingkan kearifan lokal; berorientasi pada pemberdayaan; dan menjunjung keadilan.

Sensitivitas konflik penting karena 1) Meningkatkan efektivitas program dengan mencegah terjadinya risiko, meminimalkan risiko bagi para pelaku yang terlibat, dan memitigasi risiko terjadinya kekerasan; 2) Membentuk persepsi positif atas kebijakan, program, proyek, atau inisiatif yang dilaksanakan; dan 3) Memperkuat citra dan reputasi positif dari pejabat publik (Conflict Sensitivity Consortium, 2012).

Setelah memahami makna dan arti penting sensitivitas konflik, peserta diajak untuk melihat manfaat sensitivitas konflik, yang dapat terlihat dari tahapan perencanaan, tahapan implementasi, dan tahapan monitoring dan evaluasi. Pada tahapan perencanaan, sensitivitas konflik dilakukan dengan menentukan intervensi-intervensi baru maupun tindak lanjut terhadap investasi yang sudah dilakukan sebelumnya, misalnya pemilihan wilayah operasi, penerima manfaat, mitra, staf, dan jangka waktu. Pada tahap implementasi, sensitivitas konflik dilakukan melalui pemantauan terhadap inetraksi antara konteks dan intervensi serta memberikan informasi pada persiapan proyek dan pengambilan keputusan sehari-hari. Terakhir, pada tahap monitoring dan evaluasi, sensitivitas konflik diwujudkan dengan mengukur dampak intervensi terhadap dinamika konflik atau ketertiban (Conflict Sensitivity Consortium, 2012).

Di bagian akhir, sesi ini mengajak peserta untuk mengembangkan sensitivitas konflik. Hal ini dilakukan dengan membiasakan organisasi melakukan *analisis konflik* dan memperbaruinya secara berkala. Setelahnya, organisasi diharapkan menghubungkan analisis konflik dengan siklus program-program intervensi yang dilaksanakan. Terakhir, sensitivitas konflik dikembangkan dengan merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi intervensi dengan merujuk pada hasil analisis konflik (Conflict Sensitivity Consortium, 2012).

### 4. Penggunaan Analisis Konflik untuk Membantu Perumusan Kebijakan

Bagian terakhir lokakarya diisi dengan sesi praktik di mana para peserta diminta untuk mendiskusikan tiga studi kasus berbeda pada tiga

kelompok. Sesi praktik diawali dengan pembentukan tiga kelompok besar. Pada tiap kelompok, terdapat satu fasilitator dari tim Prodi HI UPH yang mendampingi. Setelahnya, kepada peserta dibagikan lembaran studi kasus dan setiap peserta diminta untuk memahami kasus tersebut. Kemudian, dalam kelompok, peserta diminta untuk merumuskan rambu-rambu yang diperlukan untuk perumusan kebijakan.

Ada pun tiga studi kasus yang dimaksud adalah 1) Pro Kontra Proyek Taman Nasional; 2) Emisi Gas Buang; dan 3) Sarang Burung Walet. Setiap studi kasus menuntut para peserta untuk memahami konteks masyarakat, penyebab-penyebab konflik, pelaku, dan dinamika yang berkembang. Berdasarkan pemahaman tersebutlah peserta kemudian akan menentukan pagar yang tidak boleh dilanggar dalam perumusan kebijakan. Setelah 30 menit, peserta kemudian mempresentasikan hasil diskusinya. Dalam proses diskusi, fasilitator bertugas untuk mengarahkan peserta, membantu memberi penjelasan terkait analisis konflik, dan sebagai notulis.

Berdasarkan hasil pengamatan dan presentasi, dua dari tiga kelompok berhasil menemukan rambu-rambu dan rekomendasi kebijakan mengacu pada materi yang telah disampaikan pada sesi-sesi sebelumnya. Hal ini mengindikasikan bahwa lokakarya tepat sasaran dan disampaikan secara efektif.



Gambar 3. Diskusi Studi Kasus

## 5. Penutup

Sesi praktik menjadi ujung kegiatan. Lokakarya Pengembangan Wawasan Sensitivitas Konflik kemudian ditutup dengan kesimpulan dari koordinator PkM, Prof. Dr. Edwin M. B.

Tambunan, S.I.P., M.Si. Setelahnya, para peserta, tim Prodi HI UPH, dan panitia pelaksana dari Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat mengambil foto bersama.

Hal yang mengejutkan kemudian adalah ketika kedua guru besar dari Tim Prodi HI UPH diundang berbincang bersama Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kabupaten Manggarai Barat yang melihat potensi pengembangan kegiatan PkM. Sebagai hasilnya, tim Prodi HI UPH akan kembali ke Kabupaten Manggarai Barat pada 15–24 Oktober 2024 dengan agenda kegiatan PkM bertajuk Pendidikan Keterampilan Perdamiaan dan Resolusi Konflik bagi Siswa Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Labuan Bajo dan kegiatan penelitian berjudul Profil Masyarakat dan Potensi Konflik di Kabupaten Manggarai Barat. Tim akan melakukan penelitian di tiga kecamatan, yaitu Komodo, Sano Nggoang, dan Bolong.



Gambar 4. Foto Bersama

## KESIMPULAN

Proses pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah, membutuhkan pemahaman konflik dan sensitivitas konflik agar keputusan/kebijakan yang dihasilkan tidak mendapat penolakan dari masyarakat. Sensitivitas konflik perlu terus dikembangkan melalui pembiasaan analisis konflik karena baik konteks, penyebab, pelaku, dan dinamika konflik dapat berubah. Dengan demikian, pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan akan berbasis analisis. Urgensi pemahaman dan pembiasaan ini semakin tinggi bagi daerah-daerah yang sudah melalui tahap internasionalisasi, seperti Labuan Bajo di Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Kegiatan Lokakarya Pengembangan Wawasan Sensitivitas Konflik yang

telah dilaksanakan mendapat sambutan baik dan memperlihatkan potensi pengembangan kegiatan.

### UCAPAN TERIMA KASIH

Tim Lokakarya Pengembangan Wawasan Sensitivitas Konflik, di bawah asuhan Prodi HI UPH, mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat yang sudah menerima dan mendukung terlaksananya kegiatan. Tim juga berterima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UPH yang telah mendanai kegiatan dengan kontrak Nomor PM-37-FISIP/VII/2023.

### REFERENSI

- Barash, D. P. & Webel, C. P. (2009). *Peace and Conflict Studies*. Thousand Oaks, California: Sage Publications, Inc.
- Barbolet, A., Goldwyn, R., Groenewald, H., & Sherriff, A. (2005). *The utility and dilemmas of conflict sensitivity*. Berlin: Berghof Research Center for Constructive Conflict Management.
- BPS Kabupaten Manggarai Barat. (2024). *Jumlah Penduduk Kabupaten Manggarai Barat Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin (Jiwa)*, 2023. <https://manggarai Barat.kab.bps.go.id/id/statistika-table/2/MzAjMg==/jumlah-penduduk-kabupaten-manggarai-barat-menurut-kecamatan-dan-jenis-kelamin--jiwa-.html>.
- BPS Kabupaten Manggarai Barat. (2024). *Persentase Pemeluk Agama (Persen)*, 2021-2023.

<https://manggarai Barat.kab.bps.go.id/id/statistika-table/2/MjUwIzI=/persentase-pemeluk-agama--persen-.html>.

- Brown, M. E. (1996). The Causes and Regional Dimensions of Internal Conflict. Dalam M. E. Brown (ed.), *The International Dimension of Internal Conflict*. Massachusetts: MIT Press.
- Conflict Sensitivity Consortium. 2012. How to guide to conflict sensitivity. <https://www.international-alert.org/app/uploads/2021/09/Conflict-Sensitivity-How-To-Guide-EN-2012.pdf>.
- Coning, C. de. & Henderson, I. (2010). *Conflict Management for Peacekeepers and Peacebuilders*. South Africa: ACCORD.
- Gaigals, C., & Leonhardt, M. (2001). Conflict-sensitive approaches to development practice. International Alert, Saferworld& IDRC report. [http://pdf2.hegoa.efaber.net/entry/content/657/12\\_Conflict-Sensitive\\_Approaches.pdf](http://pdf2.hegoa.efaber.net/entry/content/657/12_Conflict-Sensitive_Approaches.pdf).
- International Alert. 2004. Conflict-sensitive approaches to development, humanitarian assistance and peace building: tools for peace and conflict impact assessment. <https://www.international-alert.org/app/uploads/2021/09/Training-Development-Humanitarian-Assistance-Peacebuilding-EN-2004.pdf>.
- Macedo, S. (2000). Transition to What? The Social Foundation of the Democratic Citizenship. Dalam J. H. Holifield dan C. Jilson (eds.), *Pathways to Democracy: The Political Economy of Democratic Transitions*. London: Routledge.